

2 Politisi

Dar, lahir di Grobogan pada 23 Januari 1985. Mas Dar menjadi Ketua DPD Partai Gerindra Jateng di usia 38 tahun. Sebelumnya, ia aktif di banyak organisasi, seperti Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Ketua Dewan Pembina DPP Pedagang Pejuang Indonesia Raya (PAPER), CEO Garuda TV, serta CEO PT Indonesian Defense and Security Technologies.

Lulusan SMA Taruna Nusantara itu melanjutkan kuliahnya di Negeri Sakura dengan program beasiswa di National Defense Academy of Japan. Sepulang dari Jepang, Mas Dar melanjutkan pendidikan akademisnya di Program S2 Magister Manajemen salah satu universitas di Jerman dan S3 di Institut Pertanian Bogor. Kiprahnya di dunia politik dimulai pada 2010, ketika ia menjadi asisten pribadi Ketua Umum Partai Gerindra

Prabowo Subianto. Pada 2020 ia kemudian menjabat Wasekjen Gerindra. Dengan pelantikan tersebut, Sudaryono menggantikan posisi Harvick Hasnul Qolbi yang menjabat Wamentan sejak Desember 2020.

Sementara Wamen Investasi Yuliot Tanjung merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Investasi/BKPM. Sebelumnya, ia menjadi Plt Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Deputy Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Yuliot akan membantu memastikan keberlanjutan kegiatan investasi dari pemerintahan Jokowi ke pemerintahan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto.

Sedangkan Thomas Djihadono yang merupakan keponakan Prabowo Subianto, lahir di Jakarta pada 7 Mei 1972. Tommy, pa-

nggilan akrab Thomas, merupakan anak pertama Soedradjad Djiwandono dan Biantiningsih Miderawati. Soedradjad Djiwandono merupakan mantan Gubernur Bank Indonesia yang kini mengajar di Nanyang Technological University, Singapura, sedangkan ibunya, Bianti, adalah kakak kandung Prabowo.

Tommy merampungkan S1 Bidang Sejarah di Haverford Colloge, Pennsylvania, Amerika Serikat. Kemudian melanjutkan studi Master International Relations and International Economics di Johns Hopkins University School of Advanced International Studies, Washington, AS. Kariernya dimulai sebagai wartawan magang di Majalah Tempo pada 1993 dan pada 1994 di Indonesia Business Weekly. Tommy pun pernah bekerja sebagai analisis keuangan di Whetlock Nat-West Securities, Hong Kong. (Ant/Lmg)-d

Sambungan hal 1

Bupati

merupakan urusan pribadi.

Namun, yang terjadi sebelumnya tentu melalui perasaan umat muslim dalam situasi Israel, Gaza dan Palestina. "Klarifikasinya juga hampir sama dengan yang dilakukan PB-NU sebelumnya," katanya.

Munawir Aziz sendiri menjabat sebagai Staf Khusus Pj Bupati Kudus Bidang Strategis dan Komunikasi. Sementara itu, Munawir Aziz saat dihubungi via telepon belum ada tanggapan. Di PBNU Munawir Aziz memegang Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Pagara Nusa. Sementara itu, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) juga siap

melakukan sidang etik kepada salah satu dosennya, Zainul Maarif, karena menjadi salah satu dari lima warga NU yang mengunjungi Presiden Israel Isaac Herzog.

"Unusia akan menggelar sidang etik terhadap saudara Zainul Maarif untuk mempertanggungjawabkan aktivitas yang bersangkutan," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat Unusia Dwi Putri, kemarin.

Dwi menjelaskan sidang etik dilakukan, mengingat kunjungan tersebut berdampak langsung bagi reputasi Unusia dan bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut. Ia menegaskan, mendukung secara penuh ke-

Sambungan hal 1

Kuota

dan bisa berangkat tahun lalu, tapi jemaah tersebut menunda karena beragam alasan.

Kedua, Jemaah Haji Reguler masuk alokasi kuota keberangkatan pada musim haji tahun berjalan. "Ini kita tetapkan berdasarkan urutan nomor porsi, untuk memenuhi prinsip keadilan dalam antrian," jelasnya. Ketiga, prioritas jemaah haji reguler lanjut usia.

Pasal 25 PMA No 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler ayat (1) mengatur, prioritas lansia diperuntukkan bagi jemaah dengan usia paling rendah 65 tahun dengan persentase tertentu. Sementara pada ayat (2) diatur, pemberian prioritas kuota lansia dilakukan secara sistem berdasarkan urutan usia tertua dan/atau masa

tunggu di masing-masing provinsi serta telah mendaftar paling singkat lima tahun sebelum keberangkatan jemaah haji kloter pertama.

"Tahun ini, ditetapkan besaran prioritas lansia adalah 5 persen dari kuota normal. Dari 203.320 kuota normal jemaah haji reguler, kita alokasikan 10.166 prioritas lansia yang memenuhi kriteria. Sampai akhir penutupan, yang melakukan pelunasan 4.500 jemaah atau sekitar 44 persen," paparnya.

Sebanyak 5.666 kuota prioritas lansia yang tersisa, pada akhirnya diisi jemaah yang telah melunasi biaya haji, namun dengan status cadangan. Ini juga tentu berdasarkan urutan nomor porsi.

Abdul menambahkan, berdasarkan data

Sambungan hal 1

Polri

Dari hasil pengembangan, penyidik juga menemukan dua gudang milik tersangka WRJ dan satu gudang milik tersangka HS di Kota Bandung Jawa Barat. Total ada enam TKP yang telah diungkap kepolisian.

Modus operandi yang digunakan pelaku dimulai dari penadahan yang melakukan pemesanan kendaraan bermotor kepada perantara. Selanjutnya perantara mencari debitur untuk melakukan kredit motor di dealer-dealer di seluruh Pulau Jawa dengan menggunakan identitas debitur yang diberikan imbalan Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta.

"Setelah diterima debitur, kendaraan langsung dipindahtanggankan ke perantara untuk kemudian diberikan ke penadah untuk ditampung. Apabila motor yang ditampung sudah berjumlah 100 unit, penadah berkoordinasi

dengan eksportir untuk mengeksport kendaraan tersebut ke beberapa negara, yaitu Vietnam, Rusia, Hong Kong, Taiwan, dan Nigeria," ungkap Djuhandani.

Barang bukti yang berhasil diamankan adalah sepeda motor sebanyak 675 unit dan dokumen pendukung adanya transaksi pengiriman sebanyak sekitar 20.000 sepeda motor dalam rentang waktu Februari 2021 hingga Januari 2024. Dampak kerugian ekonomi dalam kasus ini sekitar Rp 876 miliar.

Untuk langkah selanjutnya, Dittipidum Bareskrim akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Dirjen Bea Cukai), Divisi Hubinter Polri untuk bekerja sama dengan kedutaan besar lima negara yang menjadi tujuan ekspor para pelaku.

"Ini sebagai wujud komitmen Polri sesuai

Sambungan hal 1

Relaksasi

kontainer di Pelabuhan Tanjung Perak yang belum bisa mengajukan Dokumen Pabean Impor karena kendala perizinan impor.

Penumpukan tersebut menjadi aksi nasional karena ada protes dari pelaku industri yang barang impor bahan baku atau bahan penolong tidak bisa masuk berdampak pada terganggunya proses produksi industri manufaktur. Demikian juga dari para buruh migran yang mengirim barang hasil kerajinan kerja di luar negeri tidak bisa terkirim ke keluarganya.

Merespons atas derasnya kritikan tersebut dan mencoba mengurai permasalahan penumpukan kontainer di pelabuhan, serta setelah ada arahan Presiden, Kementerian Perdagangan langsung melakukan relaksasi perizinan impor melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Pemendag tersebut merupakan perubahan ketiga dari Permendag 36 Tahun 2023.

Keluarnya kebijakan tersebut mendapat respons beragam, ada yang merespons positif namun ada pula respons negatif.

Sebagai kebijakan publik, pasti akan mendapat respons yang beragam yang bersifat pro dan kontra. Kebijakan publik, termasuk relaksasi impor ini berusaha menjawab permasalahan yang sekarang muncul, namun sisi lain pasti akan memunculkan problem baru karena keragaman kepentingan stakeholders dari sebuah kebijakan publik.

Kebijakan relaksasi impor mendapat respons positif yang ukup melegakan para pekerja migran Indonesia sehingga bisa mengambil barang miliknya yang tertahan di pelabuhan.

Beragam jenis barang seperti pakaian dan barang elektronik dibeli oleh pekerja migran sebagai aset pribadi dan sangat wajar dibawa pulang ataupun dikirim ke keluarganya. Hasil kerja buruh migran tidak semua kirim dalam bentuk uang, namun banyak juga yang kirim dalam bentuk barang yang sifatnya untuk digunakan sendiri, bukan diperdagangkan.

Namun karena ada kebijakan izin impor menjadikan semua barang tertahan, dan dengan relaksasi impor tersebut menjadikan

Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), jemaah lansia dengan rentang usia 80-89 tahun saat ini, jumlahnya 34.421. Menurut itu, ada banyak alasan jemaah tidak mengambil kesempatan mengisi kuota prioritas lansia, baik aspek ekonomi, kesiapan fisik atau bisa juga berkenaan dengan pendamping lansia.

Maksudnya, ada jemaah yang berharap saat berangkat ada pendampingnya, namun jemaah yang akan mendampingi belum memenuhi kriteria berangkat tahun ini, sehingga, ada yang memilih untuk menunggu. "Jadi faktanya, kesempatan sudah diberikan untuk lansia dan jemaah tidak semua melakukan pelunasan biaya haji tahun ini," tandasnya. (Ant)-f

Sambungan hal 1

dengan arahan Bapak Presiden RI dan Bapak Kapolri untuk memberantas kejahatan transnasional yang menjadi musuh kita bersama," ujarnya.

Sementara Direktur Registrasi dan Identifikasi Korps Lalu Lintas Polri Brigjend Pol Yusri Yunus mengatakan perlunya regulasi ketat dari pihak leasing atau perusahaan pembiayaan kepada orang yang membeli kendaraan bermotor secara kredit. "Mudahnya proses pembelian kendaraan bermotor secara kredit dapat dimanfaatkan oleh pelaku penadahan atau penggelapan. Dengan uang sekian ratus ribu saja sudah bisa membawa motor ke rumah. Makanya perlu ada satu regulasi yang pasti agar tidak terlalu gampang sekali mendapatkan kendaraan," bebemnya. (Ant/Has)-f

Sambungan hal 1

sekarang pengiriman barang milik pekerja migran menjadi lebih mudah.

Demikian halnya para pelaku industri manufaktur yang memerlukan barang impor bahan baku atau bahan penolong merasakan ada kemudahan untuk mendapatkan bahan baku dan bahan penolong produksi.

Banyaknya penduduk di Indonesia dengan daya belinya masih prospektif menjadi pasar produk industri.

Sisi lain, relaksasi impor khususnya pada produk final menjadi simalakama bagi industri domestik. Sebagai contoh industri tekstil dan barang jadi tekstil akan langsung terkena dampaknya. Kebijakan tersebut menjadikan produk domestik tidak kompetitif karena akan terjadi banjir produk barang jadi impor.

Adanya dilemma tersebut, sangat wajar untuk bedah kebijakan agar tujuan kebijakan tercapai efektif dengan koreksi bagian kebijakan yang menimbulkan dampak negatif yang luas.

(Penulis adalah Dosen Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Peneliti Inspect dan Pengurus ISEI DIY)-f

SEMARAKAN HUT KE-7 SILOAM HOSPITALS Adakan Fun Run dan Clinical Symposium

YOGYA (KR) - Menyemarakkan HUT ke-7 Siloam Hospitals Yogyakarta pada 27 Juli mendatang, diadakan berbagai kegiatan di antaranya Fun Run pada 11 Agustus 2024. Tiket Fun Run masih dibuka sampai 31 Juli 2024 dengan biaya Rp 135.000 perserta, dengan fasilitas jersey, medali, totebag special edition serta berbagai refreshment dan doorprize menarik lainnya.



KR-Istimewa

Manajemen Siloam menunjukkan jersey Fun Run.

"Target peserta Fun Run 500 orang. Peserta dapat mengajak seluruh rekanan, kerabat dan keluarga untuk mengikuti kegiatan Fun Run dengan mengisi link pendaftaran pada poster informasi yang tertera. Selain Fun Run juga akan diadakan Kids Fashion Show, agar keluarga dan buah hati dapat terlibat dan berpartisipasi dalam rangkaian HUT ke-7 Siloam Hospitals Yogyakarta," kata CEO Siloam Hospitals Yogyakarta Siti Nurtata Rizki, Kamis (18/7).

Siti mengatakan, Siloam Hospitals Yogyakarta juga mengadakan seminar ilmiah untuk para tenaga medis, dokter umum dan dokter spesialis dalam event

Pediatric Trends & Health Issues, menghadirkan para ahlinya seperti Dokter Spesialis Urologi, Orthopedi, Konsultan Pediatric Orthopedi, Spesialis Anak Konsultan NICU, Spesialis Kejuwaan Konsultan dan Gizi Klinik. Seminar ilmiah dilaksanakan di Eastparc Hotel Yogyakarta pada 4 Agustus 2024 serta menjadi Clinical Symposium Pertama pada 2024.

"Topik Pediatric Trends & Health Issues menjadi topik menarik karena perkembangan anak akan selalu menjadi topik hangat untuk dibahas," ungkapnya. Memasuki Semester II-2024,

Direktur Siloam Hospitals Yogyakarta dr SA Erich Richardo MPH berharap kehadiran Siloam Hospitals Yogyakarta yang berdiri sejak 7 tahun silam, akan terus ada peningkatan pelayanan serta fasilitas rumah sakit agar pasien semakin nyaman. Penambahan fasilitas RS antara lain kamar rawat inap VVIP yang sedang berproses.

"Penambahan kamar inap VVIP untuk meningkatkan layanan rawat inap sesuai kebutuhan pasien. Layanan rawat jalan untuk temu janji dokter kini juga semakin nyaman dan cepat melalui aplikasi MySiloam," terang Erich Richardo. (Ria)-f

KPU

terkait dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka memiliki kemiripan dengan dalil-dalil permohonan Anies-Muhammad dan Ganjar-Mahfud ketika menggugat hasil pilpres di MK. "Ini sudah dilakukan penilaian oleh Mahkamah Konstitusi. Namun, kemudian dari penggugat (PDI Perjuangan) masih membawa persoalan ini di PTUN Jakarta," ucapnya.

Di samping itu, pihak yang berhak mengajukan gugatan terkait dengan sengketa proses pemilu ialah pasangan calon, bukan partai politik. Hal tersebut berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. "Selama proses berlangsung mulai dari awal pendaftaran sampai ke ujung penetapan atau putusan yang dilakukan oleh MK, tidak ada yang mengajukan keberatan terkait dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka," tuturnya.

Sementara Kuasa Hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbun mengaku yakin PTUN Jakarta berwenang untuk mengadili gugatan terhadap KPU RI terkait perbuatan melawan hukum pada Pilpres 2024. "Sangat salah jika PTUN tidak berwenang karena kami bukan (mempersoalkan) hitungan suara, tetapi kami menggugat tindakan atau perbu-

atan orang melakukan atau tidak melakukan, itu konsep TUN," katanya usai sidang di PTUN Jakarta.

Gayus menegaskan bahwa gugatan yang teregister dengan Nomor Perkar 133/G/TF/2024/PTUN.JKT ini berbeda dengan gugatan sengketa pemilu yang ada di Mahkamah Konstitusi maupun di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). "Gugatan kami adalah perbuatan melawan hukum oleh penyelenggara (pemilu)," tegas Gayus.

PDI Perjuangan mempersoalkan perbuatan melawan hukum saat KPU RI menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yakni perihal syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Ketika itu, KU tidak menaati Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengatur bahwa tindak lanjut atas putusan MK dilakukan oleh DPR atau Presiden.

"Ketua KPU yang lalu itu (Hasyim Asy'ari, red) mengirimkan keputusan (MK) itu atau permohonan agar dipakai sebagai peraturan sah ke Menteri Hukum dan HAM (Menkumham). Oleh Menkumham diarahkan kembali sebagaimana undang-undang, yaitu ke DPR," katanya. (Ant/Has)-f

Sambungan hal 1

Penyidik

lanjutan dari kegiatan sehari sebelumnya yang dilakukan KPK di ruang Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah, serta Badan Pengadaan Barang/Jasa Kota Semarang. KPK menyatakan bahwa penggeledahan tersebut berkaitan dengan penanganan tiga kasus dugaan korupsi di lingkup Pemerintah Kota Semarang.

Tiga kasus dugaan korupsi itu meliputi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023-2024, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024. Penyidik KPK juga telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dalam perkara tersebut, namun belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai identitas para pihak tersebut.

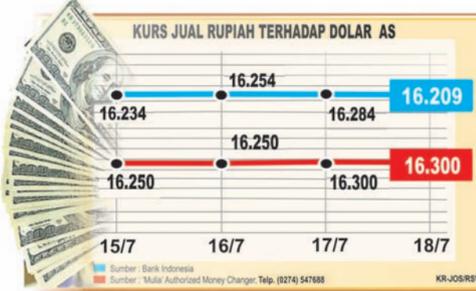
Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugianto menyebutkan ada empat orang yang telah dicegah bepergian ke luar negeri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. "Empat orang yang dilarang bepergian ke luar negeri itu, terdiri atas dua orang berasal dari penyelenggara negara dan sisanya adalah pihak swasta," ungkapnya.

Sementara Walikota Sema-

rang Hevearita Gunaryanti Rahayu belum 'ngantor' sehari setelah penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK di sejumlah ruangan Balai Kota Semarang. Pantauan di depan Ruang Wakil Walikota Semarang yang selama ini ditempati Ita, sapaan akrab Hevearita untuk berkantor di kompleks Balai Kota Semarang, tampak lengang. Mobil dinas yang biasa digunakan oleh Walikota Semarang

juga tidak tampak di lokasi, sementara petugas jaga yang bersangkuatan belum hadir. Papan pengumuman di lantai satu Gedung Moch Ihsan yang biasanya berisi agenda kegiatan Walikota Semarang juga tampak kosong. Demikian pula, agenda kegiatan wali kota yang rutin tersiar melalui laman resmi Pemerintah Kota Semarang juga terlihat kosong. (Ant/Has)-f

Sambungan hal 1



Prakiraan Cuaca

Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu C	Kelembaban
Bantul					22-30	65-95
Sleman					22-29	65-95
Wates					22-29	65-95
Wonosari					22-30	65-95
Yogyakarta					22-30	65-95

Cerah Berawan Udara Kabur Hujan Lokal Hujan Petir

Grafis: Arko

Fahrul Imam Santoso, SE, MA, Ak CA
Dosen dan Sekprodi Akuntansi Universitas Amikom Yogyakarta

SLEMAN yang merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, baru-baru ini meraih predikat sebagai kabupaten dengan Sumber Daya Manusia (SDM) tertinggi di Indonesia. Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2023 yang dikeluarkan oleh

Sleman Menjadi Kabupaten dengan SDM Paling Maju di Indonesia

Badan Pusat Statistik (BPS), Sleman mendapatkan skor 84,86, disusul Kabupaten Badung sebesar 83, Kabupaten Sidoarjo 81,88, dan kabupaten lainnya sehingga menempatkan Sleman di posisi teratas di antara kabupaten-kabupaten lain di Indonesia. Pencapaian ini bukanlah sesuatu yang baru, karena sejak tahun 2004 Sleman telah memegang posisi ini dengan konsisten.

Saat ini skor Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sleman menjadi yang tertinggi di Indonesia dengan nilai 84,86. IPM ini didasarkan pada tiga aspek utama yakni kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran. Dengan skor ini, Sleman menunjukkan bahwa warganya memiliki harapan hidup yang tinggi, lama

sekolah yang panjang, dan pengeluaran per kapita yang tinggi.

Dari aspek kesehatan, Angka harapan hidup di Sleman saat ini mencapai 75,26 tahun, yang menunjukkan bahwa warga Sleman memiliki tingkat kesehatan yang baik. Jika dilihat dari Aspek Pendidikan, saat ini lama sekolah rata-rata masyarakat di Sleman adalah 11,01 tahun, dan lama sekolah yang diharapkan adalah 16,77 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan di Sleman telah mencapai tingkat yang tinggi. Dari Aspek Pengeluaran masyarakat, pengeluaran riil per kapita di Sleman sebesar Rp16,98 juta per tahun, yang menunjukkan bahwa warga Sleman memiliki tingkat pengeluaran yang

tinggi.

Meskipun Sleman telah mencapai posisi tertinggi dalam SDM, masih ada sektor lain yang perlu ditingkatkan agar dampaknya positif bagi masyarakat. Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo, telah menyatakan bahwa pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan sektor-sektor lain yang masih kurang. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan merupakan kunci penting untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi Sleman dalam pengembangan SDM. Pemerintah harus terus meningkatkan investasi dalam pendidikan formal dan non-formal, serta pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan industri.

Lama sekolah di Sleman saat ini sudah tinggi namun kualitas pendidikan masih harus perlu diperhatikan. Pemerintah harus memastikan bahwa pendidikan yang diberikan memiliki kualitas yang baik dan relevan dengan kebutuhan industri. Aksesibilitas pendidikan harus diperhatikan agar semua warga Sleman, termasuk mereka yang berasal dari keluarga miskin, dapat mengakses pendidikan dengan mudah. Selain itu, kesejahteraan masyarakat harus tetap menjadi prioritas. Diperlukan pemerintah terus berupaya dalam meningkatkan kesejahteraan warga Sleman melalui program-program yang berfokus pada kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.

Meski Sleman telah mencapai posisi tertinggi dalam SDM, namun masih ada kekurangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah kualitas pendidikan yang perlu ditingkatkan. Sleman memiliki kelebihan dalam hal kesehatan dan pendidikan. Warga Sleman memiliki harapan hidup yang tinggi dan lama sekolah yang panjang, yang menunjukkan bahwa pemerintah telah berhasil meningkatkan kesehatan dan pendidikan di daerah ini.

Sleman dapat belajar dari kabupaten-kabupaten lain yang juga memiliki SDM yang baik. Kerja sama dengan pemerintah daerah lain dapat membantu dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Creative Economy Park

masyarakat. Pemerintah Sleman dapat mengembangkan inovasi dalam pendidikan, seperti penggunaan teknologi digital dan pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif, untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan terus meningkatkan sektor-sektor yang masih kurang dan mempertahankan investasi dalam pendidikan dan pelatihan, Sleman dapat tetap mempertahankan predikatnya sebagai kabupaten dengan SDM tertinggi di Indonesia.